

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Hubungan Indonesia dan China sudah terjalin hampir 70 tahun hubungan ini diakui pada tahun 1950. Hubungan ini tidak terlepas dari komitmen pada masa presiden Ir. Soekarno menjabat sebagai presiden pada masa itu. Beliau menunjukan komitmen politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Hubungan bilateral dua negara ini mengalami pasang surut keeratan hubungan. Pada awal pemerintahan presiden Soekarno hubungan Indonesia dan China mengalami hubungan yang mesra di tandai dengan hubungan personal antara presiden Indonesia dengan presiden China Moa Zedong.

Hubungan harmonis antara Indonesia dan China ini tidak terlepas dari kesamaan kepentingan menghadapi konstelasi politik internasional pada masa itu. Namun hubungan Indonesia dan China ini harus mengalami penurunan setelah berakhirnya masa pemerintahan presiden Soekarno. Pada pemerintahan setelah pemerintahan presiden soekarno hubungan Indonesia dan China harus mengalami pembekukan, ini terjadi pada 30 Oktober 1967 dimana pada tahun 1967 presiden Soeharto sedang menjabat sebagai presiden selama kurang lebih 1 tahun.

Di akhir tahun 1967 hingga tahun 1990 hubungan Indonesia dan China mengalami kebuntuan. Hubungan Indonesia dan China mengalami pencerahan terjadi pada tanggal 8 Agustus 1990. Ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pemulihan hubungan diplomatik Indonesia dan China. Tidak

hanya saja pada penandatanganan nota kesepahaman saja, hubungan Indonesia dan China sedikit demi sedikit diperbaiki. Pada 28 Desember 1999 dibawah pemerintahan BJ. Habibie melakukan kesepakatan mengenai bantuan hibah berkenaan dengan kerja sama ekonomi dan teknik antara Indonesia dan China.

Hubungan Indonesia dan China semakin membaik disetiap era pergantian kepemimpinan Indonesia. Pada era kepemimpinan Gus Dur terdapat kesepakatan kerjasama, keuangan, teknologi, perikanan, promosi kunjungan wisata, serta kerjasama di bidang energi dengan menukar *Liquefied Natural Gas* (LNG) Indonesia dengan produk-produk China. China juga memberikan bantuan sebesar 5 Miliar dollar AS, fasilitas kredit sebesar 200 juta dollar AS untuk pembelian bahan makanan<sup>1</sup>.

Puncak hubungan Indonesia dan China terjadi pada masa kepresidenan Susilo Bambang Yudoyono, ditandai dengan pendatanganan Nota Kemitaraan stretegis Indonesia dan China antara kedua kepala negara pada kesempatan peringatan 50 tahun Kofrensi Asia Afrika<sup>2</sup>.

Selama masa pemerintahan dua periode presiden Susilo Bambang Yudoyono hubungan Indonesia dan China mengalami perekatan terutama pada sektor perdagangan dimana investasi China sangat besar terhadap Indonesia, namun pada tahun 2007 Indonesia dan China mengalami perang dagang meski dalam skala terbatas. Itu bermula dari pengumuman dari Badan Pengawasan

---

<sup>1</sup> Wicaksono, Didik P. (2019). *Kilas Balik Hubungan Indonesia dan China*.  
<https://www.google.co.id/amp/s/amp.timesindonesia.co.id/read/news/203276/kilas-balik-hubungan-indonesia-dan-china> .Diakses 29 Februari 2020. 19:00

<sup>2</sup> I Wibowo & Syamsul Hadi. 2009. *Merangkul Cina Hubungan Indonesia-Cina Pasca Soeharto*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Pelajar, hlm.46.

Obat dan Makanan (BPOM) bahwa sejumlah produk makanan, kosmetik, minuman dan mainan anak-anak dari China mengandung bahan formalin yang membahayakan kesehatan. Namun hal ini tidak menjadi suatu permasalahan bagi hubungan perdagangan Indonesia dan China mengingat hubungan perdagangan Indonesia dan China mengalami pertumbuhan 3,6 miliar Dollar AS pada tahun 1996 lalu meningkat pada tahun 2007 10 miliar Dollar AS pada tahun 2007<sup>3</sup>.

Hubungan Indonesia dan China mengalami penguatan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ekspansi pembangunan infrastruktur yang membutuhkan investasi besar, mendorong Indonesia untuk melakukan kerjasama ekonomi intensif dengan China. Namun pada saat bersamaan, hubungan Indonesia dan China juga diwarnai ketegangan di perairan Natuna. Beberapa kali kapal nelayan China masuk ke dalam wilayah perairan Indonesia tanpa izin. Peristiwa ini tidak lepas dari klaim China di Laut China Selatan yang berbatasan dengan perairan Natuna. Dengan profil yang tampak berseberangan tersebut, di bidang ekonomi terjalin kedekatan namun pada isu kedaulatan terjadi ketegangan, apakah dua dinamika yang berbeda ini saling mempengaruhi.

Melalui program mega infrastruktur China *One Belt One Road*, China juga berupaya melakukan pendekatan terutama terhadap negara-negara yang memiliki ketegangan dengannya di Laut China Selatan. *One Belt One Road* yang diwujudkan dengan kerjasama investasi, menjadi instrumen China untuk

---

<sup>3</sup> Ibid, hlm 88

mempengaruhi sikap negara-negara yang memiliki hubungan dengan Laut China Selatan. Sebagian negara berubah sikapnya. Namun tidak demikian dengan Indonesia.

Pada era kepresidenan Jokowi hubungan antara Indonesia dan China semakin harmonis dan erat. Pada masa ini Indonesia mulai mengejar ketertinggalan pada bidang insfrakstruktur yang memerlukan investasi besar, alasan logis kenapa presiden Joko Widodo memprioritaskan pembangunan insfrakstruktur sebagai alat pertumbuhan ekonomi. Beberapa negara di dunia juga cenderung melakukan pembangunan negaranya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Indonesia melalui seluruh unsur kenegaraannya juga berupaya untuk meningkatkan pembangunan negaranya.

Salah satu bentuk pembangunan dalam suatu negara adalah pembangunan pada sektor insfrakstruktur. Hal ini dikarenakan, ketersediaan insfrakstruktur yang memadai merupakan kunci sukses dalam percepatan pembangunan suatu negara. Oleh sebab itu Indonesia terlibat dan menandatangani kebijakan *One Belt One Road* (OBOR) China atau yang sekarang direvisi menjadi *Belt Road Initiative* (BRI).

*One Belt One Road* adalah upaya untuk meningkatkan kerja sama regional dan konektivitas dalam skala trans-benua yang mencakup 2 jalur yaitu *the silk road economic* atau rute perdagangan yang melalui jalur sutra berbasis daratan dari Tiongkok, Asia Tengah, Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah hingga Eropa yang juga akan didukung dengan jalur kereta api, jalan raya, dan jaringan pipa baru. Sedangkan, *the 21st century maritim silk road* atau

biasa disebut jalur sutra berbasis laut atau jalur maritim yang menghubungkan Tiongkok dengan Asia Tenggara, Asia Selatan, Afrika, Timur Tengah dan Eropa<sup>4</sup>.

Gambar 1.1 Peta Jalur Sutra *One Belt One Road* China



Sumber: [www.Republika.co.id](http://www.Republika.co.id) (Aini, Nur 2018)

Sejak diresmikan pada tahun 2013, *One Belt One Road* telah menjadi strategi nasional Tiongkok. Awalnya, inisiasi *One Belt One Road* dipahami oleh Kementerian Perdagangan Tiongkok sebagai solusi ekspor bagi sektor manufaktur baja ke wilayah barat Tiongkok, namun kemudian berhasil menjadi kebijakan luar negeri Tiongkok untuk menciptakan suatu koridor ekonomi dengan memadukan kekuatan geopolitik dan geoekonomi negara-negara *middle power* di Eropa, Asia, dan Afrika, dengan Tiongkok sebagai pusatnya. Selanjutnya, *One Belt One Road* akan berkembang untuk tidak hanya berfokus

<sup>4</sup> Khairani, B., Khafivah, D. N., & Susanti, R. W. (2019). Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Belt And Road Initiative (Bri) Republik Rakyat Tiongkok. *Prosiding Senaspolhi*, 1(1), hlm. 296.

pada sektor ekonomi perdagangan, melainkan juga kerjasama pembangunan terpadu dari darat dan laut.

Inisiatif dari presiden Xi Jinping ini bertujuan untuk memperkuat jaringan infrastruktur, perdagangan, dan investasi antara Tiongkok dan negara-negara lain secara kolektif khususnya benua Eurasia. <sup>3</sup>/<sub>4</sub> sumber energi dengan target 4.4 miliar dari 30% PDB global, 63% dari total populasi global. *Belt Road Initiative* juga telah menghubungkan lebih dari 70 negara karena mereka sudah menyadari potensi yang diperoleh dari *Belt and Road Initiative*, kerugian paling mencolok dari pemerintah jika tidak mengikuti BRI yaitu negara akan tertinggal dalam pertumbuhan ekonomi global<sup>5</sup>.

Melihat potensi itu Presiden Jokowi langsung menandatangani kerjasama Indonesia dan China pada proyek *One Belt One Road* China. Ini dikarenakan bukan melihat potensi saja, Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi sedang gencar dalam pembangunan infrastruktur oleh karena itu *One Belt One Road* ini sejalan dengan visi presiden saat ini serta keadaan real di Indonesia.

Adapun hasil yang positif dari kebijakan pemerintah Indonesia terlibat dalam proyek *One Belt One Road* ialah meningkatnya nilai ekspor pada Oktober 2019 mencapai 14,93 miliar Dollar AS tujuan ekspor terbesar masih China. Peningkatan ekspor non migas pada Oktober 2019 ini terjadi pada bahan bakar mineral sebesar 144,6 juta dollar AS dan penurunan terjadi pada kapal, perahu,

---

<sup>5</sup> Loc.cit

dan struktur terapung sebesar 74,1 juta dollar AS. Selain non migas sektor migas pun mengalami 13,78% pada Oktober 2019<sup>6</sup>.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan Ini tidak terlepas dari bagaimana hubungan Indonesia dan China dalam ekonomi politik yang merupakan bagian dari politik luar negeri Indonesia. Kita perlu mengetahui alasan apa yang membuat Indonesia membuat keputusan untuk menjalin hubungan dengan China dalam ekonomi politik serta terlibat dalam proyek *One Belt One Road* China.

Berdasarkan permasalahan yang di uraikan, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti bagaimana hubungan antara Indonesia dan China dalam ekonomi politik serta keterlibatan Indonesia pada proyek *One Belt One Road* China.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana hubungan Indonesia dan China dalam Ekonomi politik pada proyek *One Belt One Road* China?

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Pada penelitian ini, penulis melakukan pembatasan terhadap permasalahan yang ada dan telah di rumuskan agar terarah dan terkonsentrasi dalam melakukan penelitian. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah membahas tentang hubungan Indonesia dan China dalam ekonomi

---

<sup>6</sup> Putri, Cantika Adinda. (2019). Barang-barang Ekspor RI Paling Laku di China. Cek Datanya. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191115153607-4-115626/barang-barang-ekspor-ri-paling-laku-di-china-cek-datanya> Diakses 18 Mei 2020. 11.05

politik dan apa dampak dalam keterlibatan Indonesia terhadap Proyek *One Belt One Road* China.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah mampu menjelaskan bagaimana hubungan Indonesia dan China dalam ekonomi politik dan apa dampak keterlibatan Indonesia pada proyek *One Belt One Road*

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis, penelitian ini akan memberikan gagasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan sosial dan politik serta dapat memberikan data-data
2. ilmiah yang berguna bagi siapapun yang akan melanjutkan penelitian ini yang berkaitan dengan persoalan hubungan Indonesia dan China dalam ekonomi politik.
3. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak yang membaca karya ilmiah yang penulis sajikan. Dalam penulis penelitian ini penulis memaparkan informasi dan data-data yang terkait seputar hubungan Indonesia dan China dalam ekonomi politik.